

**PENGGUNAAN PERAHU TAMBANG SEBAGAI
TRANSPORTASI DI SUNGAI KARANGPILANG SURABAYA
JAWA TIMUR MENURUT PERATURAN DAERAH SURABAYA
NO 2 TAHUN 2014 DAN MASLAHAH MURSALAH IMAM
MALIK**

SKRIPSI

Oleh
Rizky Ardyansyah
NIM. C86215023



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Ardyansyah

NIM : C86215023

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Perbandingan
Madzab

Judul Skripsi : Penggunaan Perahu Tambang Sebagai Transportasi di Sungai
Karangpilang Surabaya Jawa Timur Menurut Peraturan
Daerah Surabaya No 2 Tahun 2014 dan Masalah Mursalah
Imam Maliki

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri,
kecuali pada bagian yang ditunjuk sumbernya

Surabaya, 17 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Rizky Ardyansyah

NIM. C86215023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Ardyansyah NIM C86215023 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Desember 2020
Pembimbing,



H.AH.Fairuddin Fatwa, SH, MHI, Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Ardyansyah NIM.C86215023 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Jumat tanggal 14 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



H. AH. Fajruddin Fatwa, Sh. Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji II



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 19710652008011026

Penguji III



Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.
NIP. 197409102005012001

Penguji IV



Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 1991100320193032018

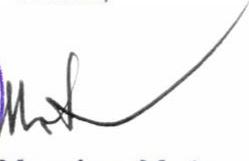
Surabaya, 21 Januari 2021

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dekan, Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizky Ardyansyah
NIM : C8615023
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam
E-mail address : ardyansyah390@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Penggunaan Perahu Tambang Sebagai Transportasi di Sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur Menurut Peraturan Daerah Surabaya No 2 Tahun 2014 dan Masalah Mursalah Imam Malik

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2021

Penulis

Rizky Ardyansyah

diimbangi dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, kehilangan waktu, biaya transportasi yang mahal, serta meningkatnya kecelakaan dan dampak lingkungan seperti kebisingan, pencemaran, kelangkaan bahan bakar minyak, serta kelangkaan lahan di perkotaan.

Pada perkembangannya transportasi meningkat sesuai dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan taraf kehidupan. Dari beberapa jenis moda transportasi yang ada di Indonesia saat ini, salah satu diantaranya adalah Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Angkutan sungai di Indonesia dimula sejak zaman pra sejarah. Saat itu manusia telah melakukan aktivitas transportasi dalam memenuhi kebutuhannya. Awalnya alat transportasi yang digunakan berupa rakit bambu atau batang kayu besar yang dibentuk dengan membuat lubang di tengahnya. Perlahan dengan berjalannya waktu, pemikiran manusia semakin maju, maka berbagai jenis alat transportasi sungai mulai tercipta. Mulai dari rakit bambu (getek), perahu lesung, sampan, sampai perahu boat yang menggunakan tenaga mesin. Angkutan sungai merupakan suatu jawaban untuk permasalahan kemacetan lalu lintas di daratan.

Peranan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) tentu sangatlah penting. ASDP dapat dimanfaatkan untuk mengangkut kebutuhan bahan pokok dan barang dalam jumlah yang relative besar dan sebagai alternatif transportasi. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. Ibrahim 14:32.

Bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat kajian teori mengenai Masalah Mursalah Imam Malik dan Peraturan Daerah Surabaya No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bab ketiga membahas tentang profil kelurahan Karang Pilang Surabaya dan profil mengenai penggunaan perahu tambang di sungai Karang Pilang Surabaya.

Bab keempat mengemukakan tentang hasil analisis Penggunaan Perahu Tambang Sebagai Transportasi di Sungai Karang Pilang Surabaya Jawa Timur Menurut Perda Surabaya No 2 Tahun 2014 dan Masalah Mursalah Imam Malik.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan intisari dari permasalahan bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (4) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.
- (6) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditetapkan.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap orang atau badan dilarang membuat keramba, rakit, dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur sungai/*waterway*.

Dalam pasal 2 nomor (8) telah jelas disebutkan bahwa setiap orang dilarang membuat rakit dan angkutan penyeberangan disepanjang jalur sungai , hal tersebut dikarenakan untuk menjaga keselamatan tersendiri bagi masyarakat yang menggunakan, dapat dilihat bahwa angkutan

desa juga tidak bisa secara langsung membubarkan kegiatan tersebut yang telah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu atau lebih tepatnya tahun 1962, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatannya sendiri. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku dan yang ketiga faktor dari lingkungan itu sendiri yang membuat masyarakat terus menggunakan transportasi tersebut. Masyarakat merasa bahwa transportasi tersebut lebih fleksibel dibandingkan jembatan yang telah dibangun oleh pemerintah.

Namun, pemerintah kota maupun kelurahan hanya bisa mengawasi jalannya aktivitas tersebut dan membiarkan kegiatan tersebut asalkan perahu tersebut telah diberikan alat keselamatan diri seperti pelampung untuk setiap masyarakat yang naik dan untuk perahu tersebut dilengkapi dengan tali yang kuat dan selalu di check kualitas dari perahu maupun pegangan tali di samping perahu. Kemudian, untuk bobot maksimal dari perahu juga sangat penting untuk diperhatikan karena jika perahu yang kelebihan muatan akan beresiko tenggelam ketika berjalan. Dan hal terakhir yaitu cuaca atau arus dari sungai itu sendiri. Pemerintah melarang kegiatan itu berlangsung apabila arus maupun cuaca dapat membahayakan para penumpang.

Dengan adanya persyaratan tersebut, pemerintah juga harus selalu memastikan agar jumlah dari perahu tambang tersebut tidak bertambah namun sebisa mungkin agar berkurang atau tidak ada sama sekali agar

bahkan untuk penarik dilakukan oleh Pak Ahmad sendiri dan hal ini terlihat sangat berbeda oleh Bu Nanik yang perahu tambang miliknya di operasikan oleh 3 pegawainya yang masih muda dan memiliki stamina yang lebih kuat dibandingkan Pak Ahmad yang sudah berumur. Namun, untuk harga yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp 2000,- berlaku sama untuk kedua perahu tersebut. Dan jam operasional dari kedua perahu tersebut sama yaitu pada pagi hari dan sore hari.

3. Tujuan perahu tambang
 - a. Membantu masyarakat sekitar agar lebih mudah dalam melakukan perjalanan atau bertransportasi,
 - b. menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan
 - c. dapat menghemat waktu masyarakat dalam bertransportasi.

4. Proses praktik perahu tambang

Proses dalam menggunakan perahu tambang dilakukan di sungai Kebraon kecamatan Karangpilang Surabaya yaitu masih dilakukan dengan cara tradisional. Perahu tambang dilakukan hanya dengan alat-alat sederhana yaitu menggunakan tali tambang sebagai penarik perahu tersebut. Untuk prosesnya pun juga masih sangat sederhana yaitu salah satu orang akan menarik tali tersebut menyebrangi sungai sedangkan satu orang lainnya akan menariki biaya kepada para penumpang. Proses tersebut tidak merusak alam karena perahu sendiri terbuat dari papan kayu dan menggunakan tali tambang saja untuk penggerakannya.

Kemudian insiden yang baru-baru ini terjadi di sungai Berantas bahkan telah memakan 4 korban yang masih dalam tahap pencarian, hal tersebut dikarenakan perahu yang dinaiki oleh korban terbalik disebabkan oleh mesin yang tiba tiba terhenti dan arus sungai yang deras. Namun masyarakat tidak merasa takut meskipun telah mengetahui berita tersebut. Dan segala peristiwa yang telah terjadi memang pasti ada sebabnya, hal tersebut juga yang membuat Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf menutup adanya perahu tambangan pada tahun 2017 namun hal tersebut hanya berlangsung selama seminggu kemudian perahu tambang mulai beroperasi lagi. Antusias masyarakat dalam menggunakan perahu tambang tidak berkurang sedikitpun, karena masyarakat memang membutuhkan perahu tambang untuk kegiatan operasional sehari-harinya.

D. Dampak Adanya Perahu Tambang

Setiap kegiatan pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif, tidak terkecuali perahu tambang. Kegiatan perahu tambang ini merupakan kegiatan yang sangat berisiko untuk masyarakat yang menggunakan dan yang mengoperasikannya. Walaupun perahu tambang ini tidak dikatakan sebagai kegiatan yang merusak lingkungan, tetapi keselamatan seseorang adalah yang utama. Akan tetapi, perahu tambang tersebut dapat dijadikan sebagai daya tarik tersendiri untuk daerah tersebut karena telah dikatakan bahwa perahu tambang telah ada sejak tahun 1961 yang berarti sudah cukup tua di Indonesia, dan secara tidak langsung kita dapat memahami budaya

Tetapi, semua hal seperti disebutkan di atas sudah diperhatikan oleh pengelola jasa perahu tambang, baik dari segi positif dan negatif, guna lebih memanfaatkan sisi positifnya, dan mengantisipasi sisi negatifnya dikarenakan niat awal dari pengelola jasa perahu tambang saat mendirikan perahu tambang yaitu: menciptakan lapangan pekerjaan baru serta membantu masyarakat untuk aktivitas sehari-hari.

Dalam praktiknya, pengelola perahu tambang yang berada di sungai Karangpilang, Kelurahan Kebraon, Kota Surabaya, para pengelola hanya melanjutkan warisan dari orang tua mereka. Pengelola perahu tambang tidak pernah mengurus perizinan di Pemerintah Kota Surabaya dan semuanya tidak dilengkapi dengan alat keselamatan serta perahu yang tidak bisa dikatakan layak.

Jadi, praktik penggunaan perahu tambang sebagai transportasi di sungai Karangpilang, Kelurahan Kebraon tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pasal 2 Ayat (8) “Setiap orang atau badan dilarang membuat keramba, rakit, dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur sungai/*waterway*.”

B. Analisis Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 dan Masalah Mursalah Imam Malik terhadap Penggunaan Perahu Tambang di Sungai Karangpilang Kelurahan Kebraon Kota Surabaya

1. Analisis Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Perahu Tambang sebagai Transportasi di sungai Karangpilang Kelurahan Kebraon Kota Surabaya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan jika perahu tambang yang ada di sungai Karangpilang, kelurahan Kebraon, Kota Surabaya tidak memiliki izin di Pemerintah Kota Surabaya dan perahu tambang tidak dilengkapi dengan alat keselamatan bagi penumpang sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menyatakan bahwa bahwa setiap orang atau badan dilarang membuat keramba, rakit, dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur sungai/*waterway*.

2. Analisis Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Perahu Tambang Di Sungai Karangpilang Kelurahan Kebraon Surabaya.

Maslahah Mursalah merupakan salah satu *istinbath* hukum yang diakui keberadaannya dan digunakan oleh para ulama' termasuk Imam Malik untuk suatu hukum yang belum ada *nash*. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan, tetapi juga mengatur yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti hukum Islam mengekang kebebasan manusia, melainkan salah satu tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan.

Ditinjau dari analisis di atas bahwa kegiatan perahu tambang di sungai Karangpilang, Kelurahan Kebraon sebagai transportasi menurut hukum Islam tidak boleh, jika perahu tambang tidak sesuai dengan standarisasi dan tidak dilengkapi alat keselamatan, karena transportasi bisa dikatakan layak jika sarana dan alat penunjang keselamatan sesuai

tujuan syara' bahwa setiap orang harus terus berusaha dan berinovasi dalam mencari rezeki.

- b. Perahu tambang di sungai Karangpilang, kelurahan Kebraon, kota Surabaya didirikan atas dasar saling bantu atau bisa dikatakan pemilik jasa mendirikan perahu tambang ini guna membantu masyarakat sekitar dalam aktivitas sehari-hari agar tidak perlu memutar jauh dan macet-macetan.
- c. Perahu tambang di sungai Karangpilang, kelurahan Kebraon, kota Surabaya turut membantu membersihkan sungai, bilamana saat ada sampah yang melintas, maka operator akan mengambil sampah tersebut serta perahu tambang ini ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar.

Dari analisis penulis di atas tentang Perahu tambang di sungai Karangpilang, kelurahan Kebraon, kota Surabaya, dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh hukum, dan dapat dikatakan masalah baik dari praktik maupun manfaatnya.

